**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

“30 Anggota DPRD Kota Tegal Terpilih, Resmi Dilantik \_ Tagar,” n.d.

6, UU No. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasn Undang-Undang Nomor 1 Tahnun 2015,” no. 046525 (2020): 53.

ADITYA, DAUSAT. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” n.d.

Agusta, Ivanovich. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

Ansori, Ansori. “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 553–72.

Arniti, Ni Ketut. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329–48.

Azmi, Bona Fauzatil. “KEDUDUKAN ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT (4) UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 9, no. 2 (2018).

Bylesjö, Cecilia, and Francisia S S E Seda. *Indonesia: The Struggle for Gender Quotas in the World’s Largest Muslim Society*. na, 2006.

“Daftar Anggota DPRD (2014-2019) \_ Sekretariat DPRD KOTA TEGAL \_,” n.d.

Dewan Perwakilan Rakyat RI. “Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat.” *Dpr.Go.Id*, 2021. https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I%0Ahttps://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-XI.

———. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK.” *Https://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/UU\_2002\_31.Pdf* 52, no. 1 (2002): 1–5.

“DPRD Sampaikan Jawaban Atas Pendapat Wali Kota Tegal Terhadap Raperda \_ Sekretariat DPRD KOTA TEGAL \_,” n.d.

Ekawati, Esty. “Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru.” *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018): 67–80.

Fahriyani, Irma Dwi. “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berbasis Kesetaraan Gender Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik.” UNS (Sebelas Maret University), 2022.

Fitri, Icha Cahyaning. “Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016).

Hadiyono, Venatius. “Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen.” *Kisi Hukum* 14, no. 1 (2015): 7–25. http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456.

Huda, Mustanul Sania. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Magetan).” Universitas Brawijaya, 2014.

Iman, Wa Ode Nur. “PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.” *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 151–60.

Indonesia, presiden republik. “Dalam Republik.” *Undang-Undang Pemilu*, 2017.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, 1999.

Kementerian Sekretariat Negara RI. “Undang-Ungan No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan.” *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 39-41. http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf.

Khakim, Mufti. “Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum,” 2017.

Madjowa, Verrianto, Diah Setiawaty, Yuandra Ismiraldi, Ramda Yanurzha, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Titi Anggraini, and Direktur Eksekutif Perludem. *Modul Open Data Pemilu*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015.

Marthin, Jhon. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Norma Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 113–25.

Nimrah dan Sakaria, Siti, Kata Kunci, and dan Budaya Patriarki. “Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014 ).” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 2 (2015): 2407–9138.

Nooryanto, Fista Herry, Lilik Prihatin, and Citra Candra Dewi. “Kajian Hukuman Bagi Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Bullying Dan Cyber Bullying.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363.

“PanturaNews - Caleg Perempuan Di Kota Tegal Capai 40,92 Persen \_ LAPORAN SL,” n.d.

“Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan Dan Kenyataan - KPU,” n.d.

Permana, Hendi. “Kebebasan Hak Politik Perempuan Dalam Parlemen.” *’ADALAH* 1, no. 7 (July 7, 2017). https://doi.org/10.15408/adalah.v1i7.8386.

“PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” n.d.

Ratna Riyanti. “PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA.” *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 2 (April 30, 2021): 1–18. https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2533.

RI, S K. “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.” *Encyclopedia of Volcanoes*, 2000.

Riyanti, Ratna. *Perempuan Dalam Pusaran Pemilu*. Penerbit NEM, 2021.

Soedarwo, Vina Salviana D. “Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender.” *Jakarta: Universitas Terbuka*, 2010.

Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (2020): 27–38.

Susiana, Sali. “Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014.” *Kajian* 19, no. 1 (2016): 1–19.

Thalib, Nur Asikin. “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 95073.

Tim Hukumonline. “Makna Equality Before the Law Dan Penerapannya.” *Hukumonline*, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-lt61a6d5afef049/.

Tong, Rosemarie Putnam. “Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Terj.” *Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra*, 1998.

Tridewiyanti, Kunthi. “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik ‘Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif’(Gender Equality and Justice in Field of Politics ‘The Importance of Participation and Representation of Wowen in Legislative’).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

Umagapi, Juniar Laraswanda. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang.” *Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34.

Widasmara, I Putu Oka Pratiwi. “PENGATURAN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XII/20141,” 2016.

**JURNAL**

ADITYA, DAUSAT. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” N.D.

Agusta, Ivanovich. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, No. 10 (2003): 179–88.

Ansori, Ansori. “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 3 (2017): 553–72.

Arniti, Ni Ketut. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020): 329–48.

Azmi, Bona Fauzatil. “Kedudukan Anggota Dpd Dari Unsur Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 22 Ayat (4) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University* 9, No. 2 (2018).

Azmi, Bona Fauzatil. “KEDUDUKAN ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT (4) UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 9, no. 2 (2018).

Bylesjö, Cecilia, And Francisia S S E Seda. *Indonesia: The Struggle For Gender Quotas In The World’s Largest Muslim Society*. Na, 2006.

Ekawati, Esty. “Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru.” *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018): 67–80.

Fahriyani, Irma Dwi. “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berbasis Kesetaraan Gender Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik.” UNS (Sebelas Maret University), 2022.

Fitri, Icha Cahyaning. “Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016).

Hadiyono, Venatius. “Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen.” *Kisi Hukum* 14, no. 1 (2015): 7–25. <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456>.

Huda, Mustanul Sania. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Magetan).” Universitas Brawijaya, 2014.

Iman, Wa Ode Nur. “Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 151–60. Indonesia, presiden republik. “Dalam Republik.” *Undang-Undang Pemilu*, 2017.

imrah dan Sakaria, Siti, Kata Kunci, and dan Budaya Patriarki. “Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014 ).” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 2 (2015): 2407–9138.

Kementerian Sekretariat Negara RI. “Undang-Ungan No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan.” *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 39-41. http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf.

Khakim, Mufti. “Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum,” 2017.

Liddle, R William. “Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik.” *(No Title)*, 1992.

Marthin, Jhon. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Norma Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 113–25.

Megawati, Suci. “Evaluasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanuddin, 2011.

Nimrah dan Sakaria, Siti, Kata Kunci, and dan Budaya Patriarki. “Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014 ).” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 2 (2015): 2407–9138.

Nooryanto, Fista Herry, Lilik Prihatin, and Citra Candra Dewi. “Kajian Hukuman Bagi Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Bullying Dan Cyber Bullying.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363>.

Nooryanto, Fista Herry, Lilik Prihatin, and Citra Candra Dewi. “Kajian Hukuman Bagi Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Bullying Dan Cyber Bullying.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363>.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pertiwi, Anak Agung Dita Intan, I Nyoman Putu Budiartha, and Diah Gayatri Sudibya. “Implikasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 493–98.

Ratna Riyanti. “Pemilihan Umum Anggota Parlemen Dalam Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Indonesia.” *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 2 (April 30, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2533>.

Saputra, Wendi Aji. “Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 4, no. 2 (2019): 14–24. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.748>.

Sarungallo, Yudith. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Masyarakat Adat Ke’te Kesu’kabupaten Toraja Utara.” Universitas Bosowa, 2022.

Sarungallo, Yudith. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Masyarakat Adat Ke’te Kesu’kabupaten Toraja Utara.” Universitas Bosowa, 2022.

Sodik, Mochamad. “Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi.” *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, No. 2 (2012): 167–80.

Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (2020): 27–38.

Susiana, Sali. “Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014.” *Kajian* 19, No. 1 (2016): 1–19.

Thalib, Nur Asikin. “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).” *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (2014): 95073.

Tridewiyanti, Kunthi. “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik ‘Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif’(Gender Equality and Justice in Field of Politics ‘The Importance of Participation and Representation of Wowen in Legislative’).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

Umagapi, Juniar Laraswanda. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang.” *Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34.

Widasmara, I Putu Oka Pratiwi. “Pengaturan Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/Puu-Xii/20141,” 2016.

**WEBSITE**

———. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK.” [*Https://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/UU\_2002\_31.Pdf*](https://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/UU_2002_31.Pdf) 52, no. 1 (2002): 1–5.

“30 Anggota DPRD Kota Tegal Terpilih, Resmi Dilantik \_ Tagar,” n.d.

“Daftar Anggota DPRD (2014-2019) \_ Sekretariat DPRD KOTA TEGAL \_,” n.d.

“DPRD Sampaikan Jawaban Atas Pendapat Wali Kota Tegal Terhadap Raperda \_ Sekretariat DPRD KOTA TEGAL \_,” n.d.

“PanturaNews - Caleg Perempuan Di Kota Tegal Capai 40,92 Persen \_ LAPORAN SL,” n.d.

“Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan Dan Kenyataan - KPU,” n.d.

“PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” n.d.

Dewan Perwakilan Rakyat RI. “Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat.” *Dpr.Go.Id*, 2021. [https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I%0Ahttps://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-XI](https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I%0Ahttps%3A//www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-XI).

Perempuan, Menteri Negara Pemberdayaan. “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan PErlindungan Anak Republik Indonesia.” *Nomor* 6 (2013): 1–39.

Permana, Hendi. “Kebebasan Hak Politik Perempuan Dalam Parlemen.” *’ADALAH* 1, no. 7 (July 7, 2017). <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i7.8386>.

Pewarisan, Barat, Hak Atas, Nagari Paninggahan, Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Puja Anjela, Ana Silviana, and Dyah Wijaningsih. “Law , Development & Justice Review Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Law , Development & Justice Review,” 2021, 98–115.

Purwanti, Ani. “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur\_Peer Review,” 2021.

Tim Hukumonline. “Makna Equality Before the Law Dan Penerapannya.” *Hukumonline*, 2023. [https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan penerapannya-lt61a6d5afef049/](https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan%20penerapannya-lt61a6d5afef049/).

6, UU No. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasn Undang-Undang Nomor 1 Tahnun 2015,” no. 046525 (2020): 53.